



KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MASIH MINIM BANGET DI KABINET DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Halo, Sobat CWI!

Pemerintahan baru Indonesia hasil Pemilu 2024 sudah terbentuk. Di ranah eksekutif, kabinet Merah Putih sudah dilantik dan di legislatif susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI sudah ditetapkan.

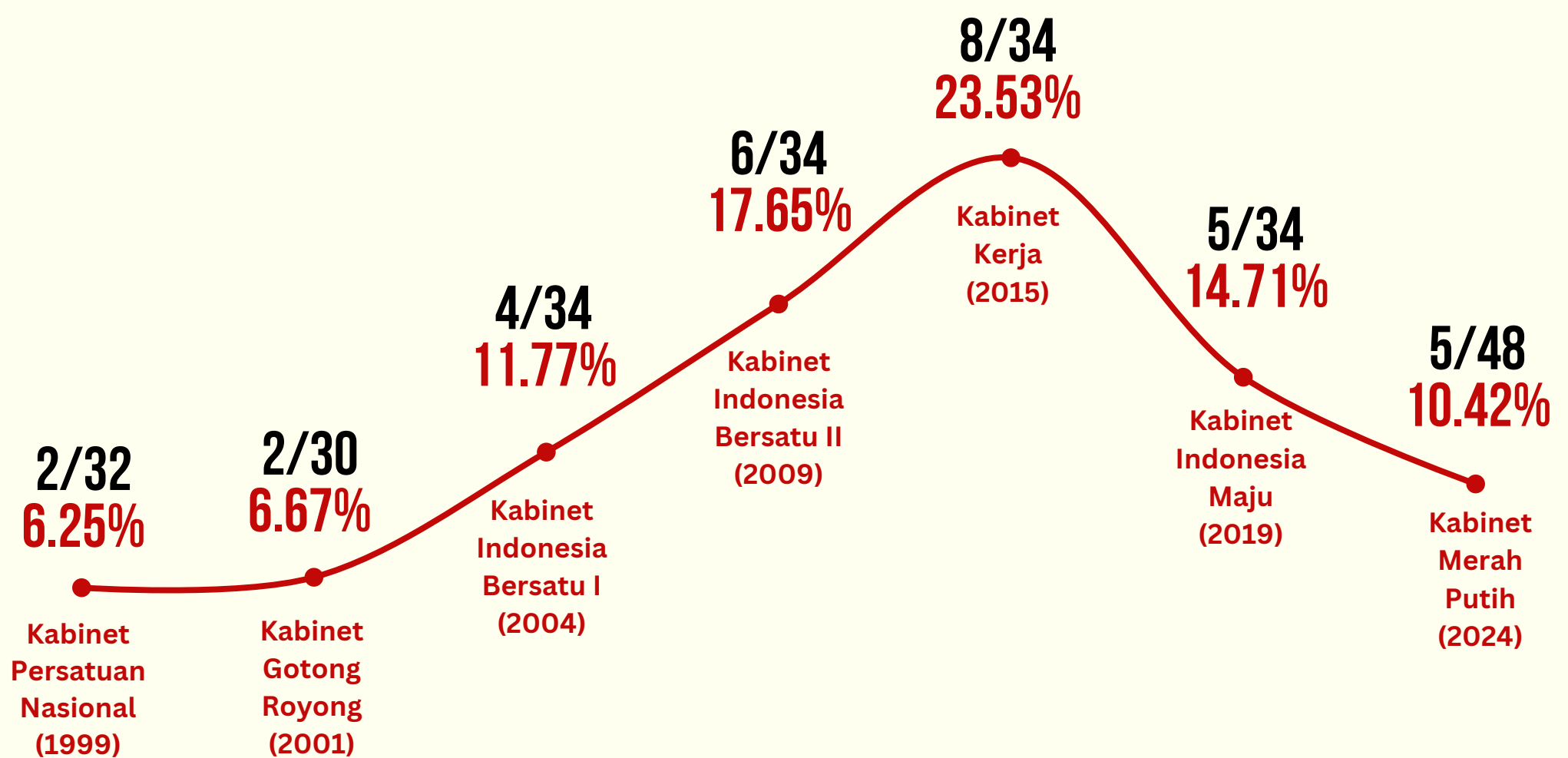
Terdapat perubahan jumlah struktur kementerian dan AKD DPR RI yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Hal ini tidak diikuti dengan kenaikan jumlah keterwakilan perempuan pada ranah birokrasi kementerian maupun AKD, malah justru menurun.

Kok bisa gitu ya?

Keterwakilan Perempuan masih Rendah di Kabinet



Kabinet Merah Putih memiliki 48 Kementerian yang menjadikannya kabinet yang sangat besar dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya yang berjumlah 34.



Data lintas waktu pasca reformasi menunjukkan Kabinet Merah Putih memiliki postur kementerian paling besar. Namun, dengan jumlah Menteri Perempuan 5 orang saja, ini mencerminkan porsi kepemimpinan menteri perempuan yang paling kecil dalam rentang waktu 20 tahun terakhir.

PEREMPUAN HANYA MEMIMPIN 10.42% KEMENTERIAN KABINET MERAH PUTIH



5 MENTRI PEREMPUAN



Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan



Meutya Viada Hafid
Menteri komunikasi
dan digital



Rini Widyantini
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi



Widiyanti Putri
Menteri Pariwisata



Arifatul Choiri Fauzi
Menteri Pemberdayaan
Perempuan
dan Perlindungan Anak

Minimnya kepemimpinan perempuan dalam kementerian berarti **pelibatan perempuan dalam pembangunan masih belum menjadi prioritas pemerintahan**. Padahal, kepemimpinan perempuan dalam birokrasi sangat diperlukan antara lain untuk dapat **mendorong terbukanya akses yang lebih adil, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta hadirnya program dan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal termasuk perempuan**.

Disaat kepemimpinan perempuan dalam Kementerian menurun, **keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 21,9%, paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia.**



**cek detailnya
di Lembar Fakta ini**

Namun, gambarannya sangat berbeda ketika kita lihat data kepemimpinan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Perempuan anggota DPR RI yang duduk sebagai unsur pimpinan komisi jumlahnya masih sangat minim.

Keterwakilan Perempuan juga rendah di unsur kepemimpinan AKD DPR

Pada Periode 2024-2029, terdapat 13 Komisi DPR RI yang berarti ada penambahan 2 Komisi baru. Dari 13 Komisi tersebut, **terdapat 6 komisi yang tidak ada perempuan dalam unsur kepemimpinannya**, yaitu:

- **Komisi I** - Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatik
- **Komisi II** - Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
- **Komisi V** - Infrastruktur dan Perhubungan
- **Komisi VIII** - Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak
- **Komisi XI** - Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

Kepemimpinan perempuan di dalam AKD memiliki fungsi strategis karena ikut menentukan agenda legislatif, mengatur jalannya sidang-sidang, dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait substansi pasal dalam rancangan UU.



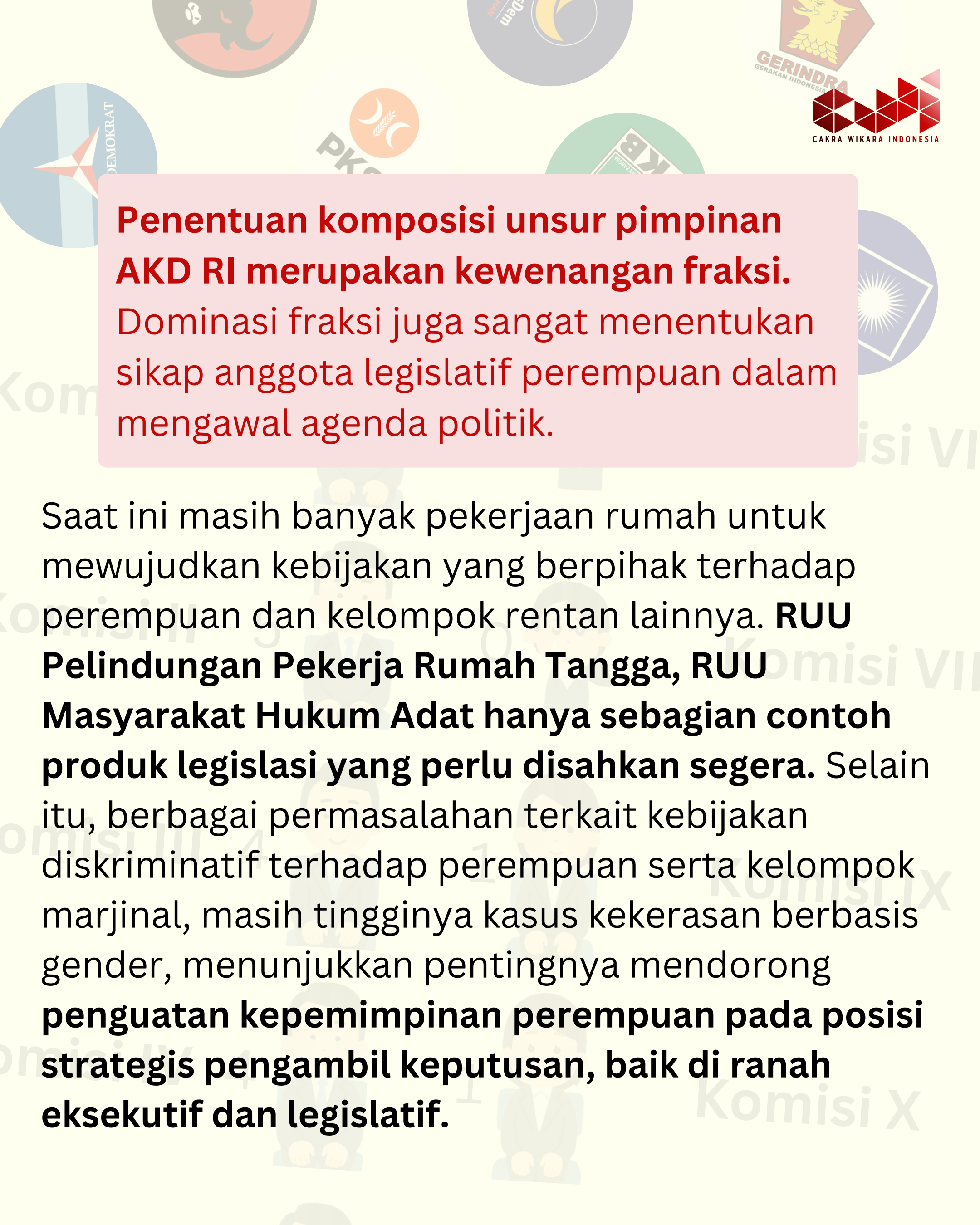
Paling ironisnya lagi, di **Komisi VIII** dengan ruang lingkup bidang agama, sosial dan **perempuan** dan anak sama sekali **tidak ada perempuan** pada unsur pimpinan komisi.

Bila komposisi pemimpin Komisi VIII saja tidak ada perempuan, pemastian pembahasan kebijakan terkait isu perempuan serta kelompok rentan lainnya dapat benar-benar berpihak dan mengakomodir kebutuhan dan pengalaman khas perempuan jadinya bagaimana?

Data Komposisi Pimpinan Komisi DPR

Komisi I	5		0		Komisi VII	2		3	
Komisi II	5		0		Komisi VIII	5		0	
Komisi III	4		1		Komisi IX	2		3	
Komisi IV	4		1		Komisi X	2		3	
Komisi V	5		0		Komisi XI	5		0	
Komisi VI	4		1		Komisi XII	4		1	
					Komisi XIII	4		1	

Dari 65 Unsur Pimpinan Komisi DPR,
ada **14 Perempuan** atau **21.54%**
yang masuk ke dalam komposisi
Kepemimpinan



Penentuan komposisi unsur pimpinan AKD RI merupakan kewenangan fraksi. Dominasi fraksi juga sangat menentukan sikap anggota legislatif perempuan dalam mengawal agenda politik.

Saat ini masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. **RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Hukum Adat hanya sebagian contoh produk legislasi yang perlu disahkan segera.** Selain itu, berbagai permasalahan terkait kebijakan diskriminatif terhadap perempuan serta kelompok marjinal, masih tingginya kasus kekerasan berbasis gender, menunjukkan pentingnya mendorong **penguatan kepemimpinan perempuan pada posisi strategis pengambil keputusan, baik di ranah eksekutif dan legislatif.**

REFERENSI



Margret, A. dkk (2022). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah* (Edisi Revisi). Cakra Wikara Indonesia. <https://cakrawikara.id/publikasi/buku/menyoal-data-representasi-edisi-revisi/>

Margret, A. dan Yolanda Panjaitan (2023). Kertas Kerja Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia. Cakra Wikara Indonesia, UN Women <https://cakrawikara.id/publikasi/naskah-kebijakan/kertas-kerja-penguatan-keterwakilan-politik-perempuan-di-indonesia/>

Margret, A. dkk (2021). Birokrasi Representatif : Tantangan dan Peluang Membangun Kesetaraan pada Jabatan Pimpinan Tinggi. Cakra Wikara Indonesia. <https://cakrawikara.id/publikasi/buku/birokrasi-representatif-tantangan-dan-peluang-membangun-kesetaraan-pada-jabatan-pimpinan-tinggi-kementerian/>

Marsa, F. “Jumlah Menteri Perempuan sejak Reformasi, Terbanyak di Era Jokowi”. GoodStats. (Oktober 2024) <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-menteri-perempuan-sejak-reformasi-terbanyak-di-era-jokowi-HtbiH>